

Analisis Beban Operasional pada Council of Palm Producing Countries (CPOPC) Indonesia

Christy Dumaris Nancy¹, Rahman Faisal²

¹Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University

Email:¹ cdumarisnancy@gmail.com, ²rahmanfaisal14@gmail.com

Article History: Received on 2021-01-15, Revised on 2021-03-20, Published on 2021-07-06

ABSTRACT

Operational costs are a form of sacrifice that must be spent so that the production process or company activities can continue to move. The research objectives study are to 1) analysis the operational load implementation procedures for the object research and 2) describe the operational financing records in the research object (CPOPC) Indonesia. The research has descriptive qualitative method, which provides an overview of the data obtained and then processed and described. The research collected data by means of interviews is to prove the information or information previously obtained. The results show that the procedures and recording of operational expense financing in the Council of Palm Oil Producing Countries are still not optimal.

Keyword : Operational Procedures, Recording Operational Expenses

ABSTRAK

Biaya operasional merupakan salah satu cara dengan melakukan pengorbanan yang sangat perlu dikeluarkan guna produksi, kegiatan perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Adapun objek penelitian ini untuk 1) Menganalisis prosedur pelaksanaan beban operasional pada tempat yang dijadikan objek penelitian dan 2) Mendeskripsikan pencatatan pembiayaan operasional dalam objek penelitian. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang didapat lalu diolah dan dideskripsikan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan Pencatatan pembiayaan beban operasional pada Council of Palm Oil Producing Countries masih belum optimal.

Kata kunci: Prosedur Operasional, Pencatatan Beban Operasional

Cara mengutip:

Author. (2020). Article title. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 5 (1), xx-xx

PENDAHULUAN

Salah satu komoditas unggulan di Indonesia adalah Kelapa sawit dan juga sebagai sumber utama devisa negara, dan mampu berkontribusi untuk peningkatan pendapatan dibidang pekebunan, selain itu dapat mengentaskan kemiskinan, lapangan kerja tentunya juga berdampak pada perbaikan ekonomi di wilayah tertentu, iklim usaha terbuka dan turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup yang sangat penting. Jumlah pekebunan kelapa sawit Indonesia sampai dengan tahun 2014 sebesar 10,75 juta Ha, dimana hasil produksi pada *Crude Palm Oil* (CPO) mencapai nilai sebesar 29,28 juta ton. Jumlah nilai ekspor CPO dan pada bidang minyak sawit lainnya mencapai 22,89 juta ton dengan potensi pemasukan nilai ekspor US\$ 17,46 milyar. Nilai total pekebunan pada bidang kelapa sawit ini tentu saja atas keterlibatan pekebunan besar yang dimiliki Negara dan juga ditopang dengan pekebunan besar yang dimiliki oleh swasta serta adanya pekebunan yang dimiliki oleh rakyat.

Dalam menjelaknak kerja sama antara produsen kelapa sawit, maka perlu dilakukan pertemuan-pertemuan antara Negara-Negara yang menghasilkan kelapa sawit terbesar. Pertemuan bisa dilakukan di Negara Indonesia Malaysia dan Colombia yang baru bergabung dalam berkelanjutan dan ramah lingkungan minyak sawit yang diproduksi. Setiap pertemuan yang dilakukan akan ditanggung biayanya oleh Pemerintah atau Negara baik tiket, transportasi, hotel atau penginapan, konsumsi dan gedung untuk seminarnya. Dan akan mengundang Menteri atau Pejabat dari setiap Negara-Negara produsen penghasil kelapa sawit di dunia untuk saling memberikan pendapat ataupun masukan demi berkelanjutan dan ramah lingkungan minyak sawit yang diproduksi.

Dari segi keuangan CPOPC tidak mengalami penurunan yang diakibatkan adanya Covid-19 karena semua biaya yang ditanggung Negara, tapi yang terganggu adalah waktu pelaksanaan sebuah acara yang tertunda. Sehingga adanya pengurangan kegiatan Perusahaan. Dalam pelaporan keuangan Perusahaan CPOPC di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahun untuk mengetahui setiap anggaran yang dikeluarkan secara terperinci dan sesuai dengan bukti pengeluaran. Bagian yang paling penting adalah realisasi anggaran ditahun 2020 yang mengalami pengurangan kegiatan yang dikarenakan adanya Covid-19 dibanding tahun sebelumnya yang banyak melaksanakan kegiatan. Salah satu faktor atau kualitas laporan keuangan yaitu transparansi dan akuntabilitas sebuah faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada saat di audit oleh BPK.

Penerapan ketentuan operasional yang dilakukan sesuai SOP Council of Palm Oil Producing Countries dan sesuai dengan standard akuntansi dalam PSAK 45 yang berlaku. Organisasi Nirlaba yang bergerak pada penyediaan jasa dimana dalam menjalankan organisasinya tidak semata pada nilai keuntungan, karena dalam menjalankan organisasi tentunya mendapatkan biaya dari besarnya kontribusi, nilai perolehan pendanaan yang didapat secara nilai investasi. Atas peneanaan tarif dari nilai jasa yang diberikan oleh organisasi/perusahaan sepenuhnya digerkan atas bantuan biaya operasional dari pemerintah. Dalam operasional dan tata kelola keuangan pada organisasi/perusahaan nirlaba dimana dihasilkan dari nilai surplus yaitu adanya perbedaan antara aliran kas masuk dan nilai kas keluar. IAI secara konsisten telah menyebutkan bahwa dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang standard pelaporan keuangan kegiatan organisasi/perusahaan yang terdiri dari pelaporan kondisi keuangan, pelaporan aktivitas organisasi/perusahaan, pelaporan arus kas yang ada, dan pencatatan dari hasil pelaporan keuangan pada intinya.

Prosedur beban pembiayaan sesuai berdasarkan pada Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pada bagian Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana dalam penetapan Peraturan Menteri Keuangan mengenai alur dan Sistem Akuntansi Pusat dari nilai Investasi Pemerintah. Kondisi di lapangan sesuai prosedur ketentuan harusnya tetap tidak melanggar hukum maupun peraturan yang sudah diterapkan. Pengamatan/observasi yang dilakukan sudah sesuai SOP perusahaan dan PSAK yang berlaku di Kementerian Keuangan Negara. Kemungkinan masalahnya

adalah penerimaan invoice yang kadang terhambat atau telat diterima oleh perusahaan. Pembiayaan merupakan bagian yang tidak kalah penting untuk operasional suatu institusi. Dengan adanya pembiayaan untuk operasional maka perusahaan atau institusi dapat menjalankan kegiatan program kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan pembiayaan yang baik dan kuat dapat menopang semua kegiatan usaha yang dijalankan. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah bagaimana pembiayaan itu dilakukan.

Selain prosedur, sisi pembiayaan tidak kalah penting dan dari tingkat kepentingannya tentunya dilakukan untuk dapat menopang setiap pembiayaan sesuai dengan beban dan target yang diinginkan. Kondisi pembiayaan untuk sebuah acara-acara pertemuan antara Menteri dan Pejabat-Pejabat penting Kelapa sawit yang dibayarkan seperti tiket pesawat, sewa gedung pertemuan penginapan/hotel dan kegiatan lainnya. Nilai pembiayaan yang berjalan itu pada hakikatnya harus disetujui oleh Pemerintah dan Negara yang bekerjasama di Kelapa Sawit. Kendala yang ditemui kadang keterlambatan penerimaan invoice kepada perusahaan. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis menilai bahwa perlunya untuk melakukan Analisis Beban Operasional Pada Council of Palm Oil Countries.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerapan ketentuan operasional yang dilakukan sesuai SOP di CPOPC dan PSAK Nomor 45 yang berlaku. IAI telah memberikan panduan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dimana tujuan dari pelaporan kondisi keuangan organisasi nirlaba adalah dengan penyediaan informasi yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan penyumbang, anggota, kreditur, dan juga pihak lain yang telah menyediakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Dalam pe laporan kondisi keuangan tentunya dapat melihat pembatasan pendanaan, dimana diatur dalam PSAK No. 45 yaitu pertama, adanya pembatasan secara permanen mengenai penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Kedua yaitu pembatasan temporer atau sementara yaitu pelaksanaan pembatasan daya organisasi dalam periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya kebutuhan. Ketiga yaitu sumbangan terikat yaitu adanya kebutuhan sumber daya yang perlu digunakan dalam jumlah terbatas dengan tujuan tertentu. Terakhir yaitu adanya sumbangan tidak terikat yaitu penggunaan sumber daya yang tidak dibatasi namun memiliki tujuan yang jelas dan terarah oleh kebutuhan organisasi. Laporan keuangan merupakan sebuah instrumen untuk menilai dan menganalisa kondisi organisasi (Budi, 2019) Dalam setiap Pelaporan Keuangan yang dijabarkan dalam PSAK No. 45 mendefinisikan beberapa komponen pelaporan keuangan pada sebuah organisasi nirlaba dengan adanya yaitu pelaporan posisi keuangan, berikutnya adalah kemampuan organisasi atau perusahaan dalam berkontribusi atas jasa yang dilakukan. Berikutnya adalah likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan organisasi/perusahaan guna memenuhi kebutuhan dan juga kewajiban yang menjadi tanggung jawab organisasi/perusahaan termasuk pada nilai kebutuhan pendanaan dari luar. Terakhir yaitu laporan aktivitas artinya setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan tentu harus memiliki pertanggung jawaban yaitu laporan yang tervalidasi dengan baik.

Sedangkan menurut Supriyono (2011:43) mengemukakan bahwa beban operasional merupakan biaya yang secara pelaksanaan/penggunaan menjadi bagian dari menjalankan roda kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diambil dari modal kerja. Penjelasan dari biaya operasional juga dapat diartikan merupakan semua jumlah dari biaya yang diepruntukan untuk penyelenggaraan kegiatan atau jenis pelayanan dari jasa yang telah dilakukan dan dikenakan atas biaya yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait adanya penyelenggaraan pelayanan jasa yang telah dilakukan. Sementara Werner Murhadi (2013:37) menjabarkan mengenai biaya operasi (*operating expense*) adalah kebutuhan pembiayaan yang saling berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan dimana terdapat kebutuhan seperti biaya penjualan, biaya administrasi (*selling and administrative expense*), biaya kebutuhan promosi seperti iklan (*advertising expense*), kebutuhan untuk biaya akan penyusutan terhadap barang inventaris (*depreciation and amortization expense*), dan juga biaya perbaikan serta biaya pemeliharaan yang dibutuhkan (*repairs and maintenance expense*). Lebih lanjut Sunardi (2015:71) memaparkan mengenai biaya operasional adalah semua kegiatan yang terdapat biaya pengeluaran saling berhubungan dengan kebutuhan operasional, salah satunya yaitu pengeluaran yang langsung digunakan untuk mendukung produksi

dan atau kegiatan pembelian barang diperuntukan dalam perdagangan termasuk juga biaya umum lainnya

Sementara menurut Nafarin (2004:3) menjabarkan bahwa perencanaan adalah sebuah tindakan yang menjadi dasar dan dibuat atas dasar dukungan data fakta dan asumsi dapat memberikan gambaran kebutuhan kegiatan agar dapat dilakukan berdasarkan waktu guna mencapai tujuan yang diharapkan dan telah ditentukan. Adapun perencanaan pada biaya operasional dapat dikatakan memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Pertama, dapat membantu manajemen dalam menyesuaikan kebutuhan dilandasi pada perubahan – perubahan lingkungan. Kedua yaitu memberikan bantuan pada kristalisasi terhadap penyesuaian setiap permasalahan yang ada. Ketiga, dapat memberikan masukan kepada manajer dalam memahami baik secara keseluruhan maupun tertentu terhadap gambaran kebutuhan biaya operasi untuk dapat lebih terarah. Keempat yaitu dapat membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan mampu lebih tepat mengambil keputusan. Kelima yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan atas setiap perintah dalam operasional organisasi/perusahaan. Keenam adalah dapat memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi yang dibutuhkan dan antar perusahaan/organisasi. Ketujuh yaitu menjadikan perusahaan/organisasi dalam membuat tujuan yang lebih terarah dan secara khusus, detail dan mampu dipahami. Terakhir yaitu menghemat waktu dalam menjalankan usaha dan menghitung kebutuhan dana.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian pengumpulan data adalah proses yang penting untuk mengetahui dan mendapatkan data yang dibutuhkan agar dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Proses pengumpulan data adalah satuan proses atau langkah atau tahapan yang dapat dilakukan pada metode ilmiah. Sejatinya, data yang dikumpulkan harus dapat digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Kecuali terdapat kebutuhan secara eksploratif, agar dapat menguji hipotesis dalam penelitian yang dilakukan. Sementara data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data penelitian yang dapat diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian.

a. Wawancara

Salah satu cara dalam pengumpulan data yaitu wawancara. Hal ini merupakan cara yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti, sehingga metode ini menjadi sangat banyak digunakan dan menjadi populer. Sementara arti dari wawancara itu sendiri adalah teknik pengumpulan data, dalam pelaksanaan mendapatkan datanya dapat dilakukan baik secara langsung bertatap muka maupun melalui sambungan telepon dan lain sebagainya yang jadi subjek penelitian melalui proses percakapan dengan tujuan agar dapat mengetahui untuk mengkonstruksi mengenai pendapat/opini dari orang yang dijadikan subjek penelitian dari mulai kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai.

b. Observasi

Sementara definisi dari observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data lainnya yang dapat dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dilokasi atau pada objek yang hendak diteliti. Proses observasi dapat berlangsung dengan melakukan pengamatan mulai dari melihat secara langsung, melakukan perekaman, proses perhitungan dan pengukuran dan juga melakukan pencatatan setiap kejadian yang diamati dalam pelaksanaan observasinya. Oleh karena itu observasi dapat dilakukan dan/atau dikatakan yaitu sebagai proses dari kegiatan yang dilakukan secara sistematis dari setiap kejadian, bentuk perilaku, objek penelitian yang dilihat secara langsung guna mendukung penelitiannya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data pendukung penelitian juga dapat berupa dokumen. Dimana arti dari dokumentasi yaitu cara mengumpulkan, mendapatkan, menyusun dan mengelola hasil temuan yang didapat dalam bentuk dokumen literatur. Dari catatan, temuan angka dan lain sebagainya yang tercatat pada aktivitas manusia dan yang dapat dianggap memiliki manfaat untuk dijadikan pendukung data berupa keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan (Sulistyo Basuki, 1996: 11). Setelah narasumber ditentukan, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang

akan digunakan saat wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya untuk membatasi penelitian. Namun pertanyaan tersebut akan bersifat fleksibel, artinya bahwa pertanyaan akan berkembang seiring wawancara tersebut dilakukan.

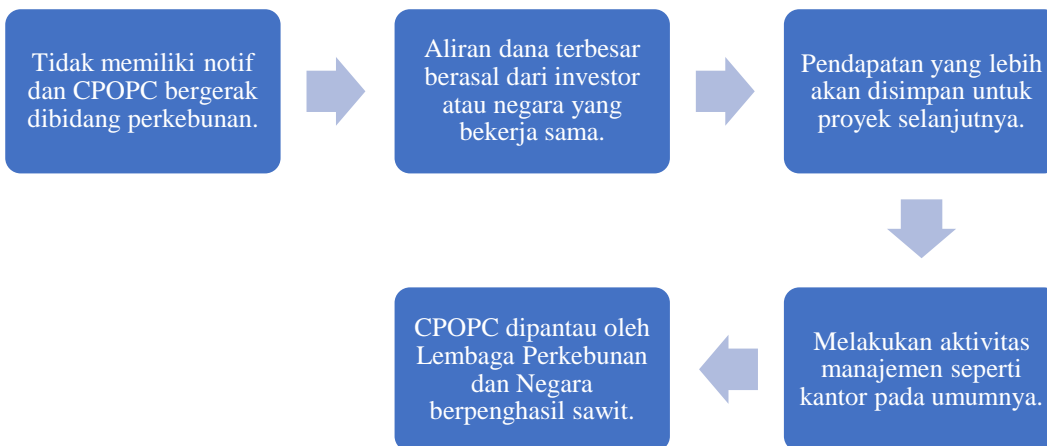
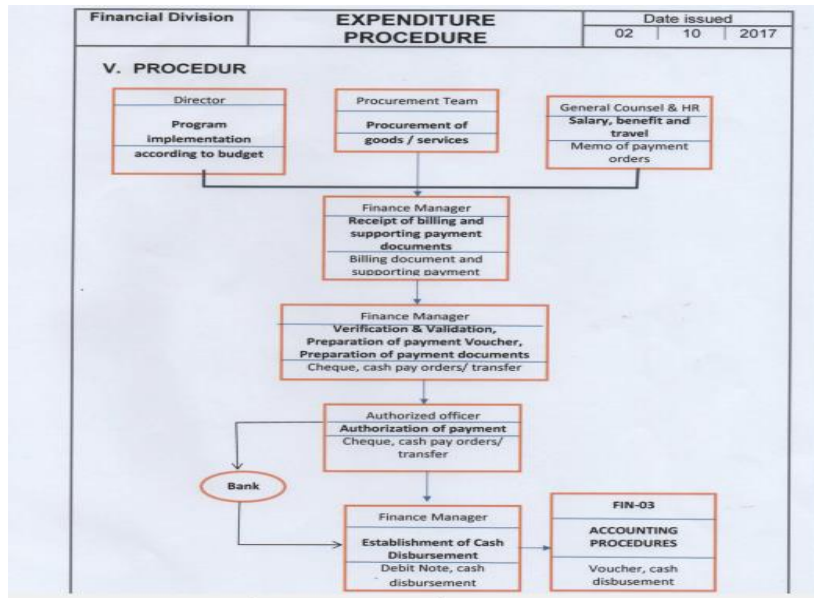
Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dikarenakan dalam proses penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang keadaan objek dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta. Mulai dari cara mengumpulkan data, penyajian dan proses menganalisis hasil observasi di lapangan yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan sehingga diakhir penelitiannya didapati dan ditarik kesimpulan terhadap temuan an fakta. Penelitian ini dapat memberikan penafsiran dari uraian data yang didapat dari kondisi situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang dapat terjadi. Kebutuhan dari satu atau dua keadaan atau lebih, yang memiliki hubungan antar variable yang diteliti dan ditimbulkan dapat memiliki perbedaan antar fakta yang ada dengan hasilnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sementara Sugiyono (2008:15) menjabarkan tentang pengertian penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada dasar suatu filsafat yaitu *post positivism* yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objektif yang diteliti sebagai instrumen kunci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CPOPC yang menjadi objek penelitian memiliki prosedur dan/atau dapat dikatakan sebuah SOP untuk melakukan transaksi laporan aktivitas kegiatan. Setiap proses kegiatan apapun yang menyangkut laporan keuangan kantor akan dibuatkan *Purchase Order* (PO) untuk mendapatkan persetujuan apakah budget mencukupi dan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. *Purchase Order* (PO) dibuat rangkap dua untuk disimpan oleh perusahaan dan dikirimkan untuk penyewa jasa atau *supplier*. *Supplier* menerima *Purchase Order* merupakan keuangan dan dapat dirasakan secara langsung dengan proses penyiapan penawaran dan memberikan sebuah *invoice*. *Supplier* dapat melakukan pengiriman barang atau jasa penyewaan untuk menyiapkan pesanan sesuai dengan *Purchase Order* (PO) yang dapat diterima ke bagian keuangan yang menangani aktivitas kegiatan yang dapat disertai *invoice* yang telah dibuat untuk *supplier*. Pelaksanaan aktivitas kegiatan dilakukan setiap beberapa kali dalam satu tahun sekali, dengan pembagian berupa beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Melakukan Persiapan
Tahapan ini meruakan proses pembagian tugas serta proses tanggung jawab, pembentukan, persiapan dana. Mencari gedung dan hotel, agensi travel atau vendor untuk menyewa jasa yang dibutuhkan dan di perlukan. Membuat PO agar terperinci setiap anggaran yang dikeluarkan.
2. Tahap Pelaksanaan
Menghitung setiap pengeluaran dengan benar dan terperinci, menyiapkan data dokumen yang dibutuhkan untuk setiap acara kegiatan selama berlangsungnya acara, membuat undangan untuk Dewan-Dewan penting yang berpengaruh kepada sawit dan Negara yang berpenghasil sawit.
3. Tahapan Penyelesaian
Melunasi setiap pembayaran yang belum lunas dan membuat laporan akhir keuangan setelah selesainya acara berlangsung. Menyimpan setiap tagihan-tagihan dan pembayaran yang dikeluarkan dan di terima oleh perusahaan sebagai bukti audit nanti.

Prosedur SOP CPOPC



Gambar 4.1
Struktur SOP CPOPC

(Sumber: Council of Palm Oil Producing Countries)

Dari data dan hasil pengamatan yang telah dilakukan di CPOPC penelitian ini, sehingga didapati hasil yang dapat dianalisis temuan yang didapat pada prosedur pelaksanaan dan pencatatan beban operasional yang dapat menjadi penyebab yang menjadi masalah pada *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).

Prosedur Pelaksanaan Beban Operasional Pada Council of Palm Oil Producing Countries Belum Sesuai PSAK 45

Dimana prosedur pelaksanaan beban operasional CPOPC dilakukan sesuai SOP dan PSAK nomor 45 yang dimana CPOPC merupakan sebuah organisasi Nirlaba yang dapat menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba atau keuntungan yang didapat. Organisasi seperti ini pada umumnya dilakukan pembiayaannya dari kontribusi, perolehan dana dari nilai investasi yang didapat, juga terhadap dari hasil pengenaan tarif dari jasa yang telah diberikan dan juga dapat berupa pemberian dari pemerintah.

a. Entitas Nirlaba

Entitas nirlaba dapat dikatakan sebagai organisasi nonprofit yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat. Atau juga disebut sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungannya sedikit pun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya (Oleck & Stewart, dikutip dalam Salusu, 2004: 9-10). Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2011: 45.1).

b. Unsur-unsur Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Dari penjelasan pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 45 (Hasil revisi 2011), menuturkan bahwa pelaporan keuangan entitas nirlaba meliputi: Pertama, pelaporan dari kondisi Posisi Keuangan. Pelaporan kondisi dari posisi keuangan mencakup entitas nirlaba yang dilakukan secara keseluruhan dalam penyajian total aset, liabilitas, dan aset neto. Bagian yang kedua adalah pelaporan tentang aktivitas, dimana pelaporan aktivitas dalam hal ini mencakup entitas nirlaba yang dihitung secara keseluruhan dan bentuk menyajikan dapat berupa perubahan atas jumlah aset neto yang diakumulasikan dalam suatu periode. Pada perubahan dalam bentuk aset neto pada pelaporan setiap aktivitas dapat dilihat pada aset neto dan/atau nilai ekuitas pada posisi keuangan perusahaan/organisasi. Ketiga, pelaporan tentang kondisi Arus Kas dimana memiliki tujuan agar dapat melakukan penyajian sumber informasi dari penerimaan dan pengeluaran terhadap pemasukan kas pada satu periode. Keempat, yaitu hasil catatan atas Laporan Keuangan yang Catatan, yaitu yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dari tujuan pemberian catatan dapat diketahui dari informasi keuangan yang diperlukan dan diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

Tabel 4.1
Prosedur PSAK No.45 dan SOP CPOPC

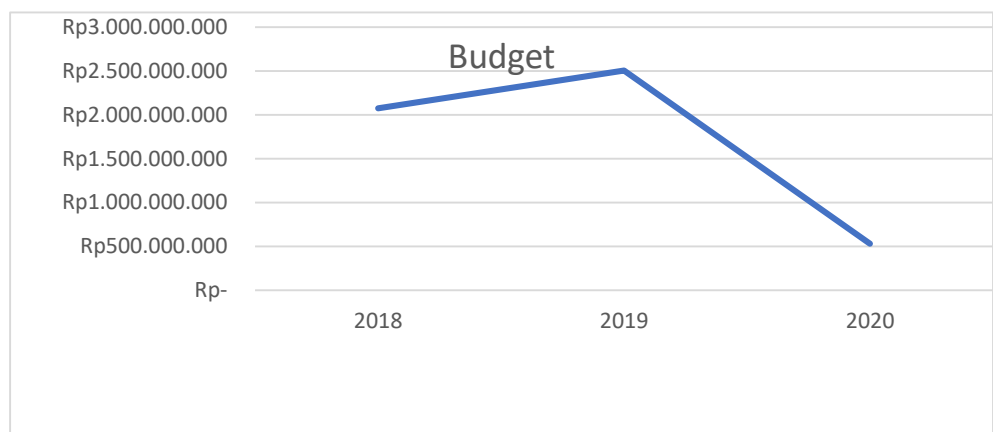
SOP CPOPC	PSAK No.45 Nirlaba
1. Tidak memiliki motif dan CPOPC bergerak dibidang perkebunan.	1. Tidak mempunyai motif untuk mencari laba, dan biasanya bergerak dalam bidang jasa. Kalaupun organisasi menghasilkan laba maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
2. Aliran dana besar yang berasal dari investor atau negara yang bekerja sama.	2. Aliran dana terbesar berasal dari anggota dan donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2 Pendapatan dapat lebih dan akan disimpan untuk proyek selanjutnya.	3. Kelebihan pendapatan atas pengeluaran yang dihasilkan dari operasi jangka pendek digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai tujuan.
3 Melakukan aktivitas manajemen seperti kantor pada umumnya.	4. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran,

	pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana.
1. CPOPC dipantau oleh Lembaga Perkebunan dan Negara berpenghasil sawit.	5. Organisasi nirlaba biasanya dipantau masyarakat umum dengan seksama.
	2. Tidak ada kepemilikan seperti halnya organisasi yang mencari laba.

Dari 6 prosedur pelaksanaan beban operasional di PSAK 45 liberal ada Satu (1) SOP CPOPC yang belum menerapkannya sehingga belum sesuai PSAK 45 pelaksanaannya, yaitu dikarenakan ketidakadanya nilai kepemilikan dalam sebuah organisasi yang hanya focus pada mencari laba. Alasannya tidak menerapkan SOP tersebut karena CPOPC sudah memiliki susunan organisasi. Perbedaan Prosedur PSAK No.45 dan SOP CPOPC antara lain yaitu perusahaan bertanggung jawab penuh atas aktivitas yang dilakukannya dan dikarenakan adanya nilai yang berbeda dari suatu kepentingan yang dibutuhkan oleh manajemen, para pemegang saham, dan juga para pemangku kepentingan disuatu perusahaan/organisasi.

Pencatatan Pembiayaan Operasional Pada Council of Palm Oil Producing Countries Belum Sesuai PSAK 45

Data yang diambil dari tahun 2018 sampai 2020 setiap tahunnya memiliki perbedaan pengeluaran anggaran biaya, yang dimana pencatatan biaya operasional di Council of Palm Oil Producing Countries belum sesuai PSAK 45 dan tidak sama setiap tahunnya.



Gambar 4.2 Grafik Budget Council of Palm Oil Producing Countries
Sumber: Data Budget 2018-2020 CPOPC

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan kenaikan serta penurunan budget yang dratis. Dari data budget 2018 yaitu sebesar Rp. 2.072.445.332, kemudian pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.504.306.175 dan yang terakhir sebesar Rp. 530.626.000. Kenaikan buget yang terjadi pada taun 2018 ke 2019 yaitu sebesar Rp. 431.861.143 sementara penurunan yang drastis dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 1.973.680.175 . Faktor ini disebabkan karena beberapa hal seperti pertama event atau acara yang digelar berbeda setiap tahunnya, sehingga setiap tahun memiliki perbedaan berapa kali event atau acara yang dibuat. Kedua, biaya anggaran setiap tahun berbeda, biaya akan semakin besar bila acara yang digelar lebih banyak dan begitu sebaliknya anggaran akan kecil bila acara yang digelar hanya sedikit. Ketiga, tempat pelaksanaan yang dilakukan, apabila event atau acara digelar di Negara lain akan jauh lebih banyak mengeluarkan biaya daripada melangsungkan acara di dalam Negeri lebih

menekan budget atau sedikit pengeluaran biaya anggaran.

Tabel 4.2
Pencatatan Pembiayaan PSAK No.45 dan CPOPC

CPOPC	SAP
1. Laporan Posisi Keuangan Organisasi	1. Laporan kondisi Posisi pada Keuangan Organisasi
2. Pelaporan aktivitas	2. Laporan aktivitas
3. Laporan terhadap arus pada kas a. Aktivitas Operasional Utama b. Aktivitas Pendanaan	3. Laporan arus kas a. Aktivitas Operasional Utama b. Aktivitas pada nilai investasi Semua penerimaan dan pengeluaran c. Aktivitas Pendanaan.
4. Catatan atas pelaporan keuangan a. Perincian dari suatu akun dapat disajikan	4. Catatan atas laporan keuangan a. Perincian suatu akun yang disajikan b. Kebijakan akuntansi

Sumber: Anand, D. (2018)

Perbedaan Pembiayaan PSAK No.45 dan SOP CPOPC antara lain yaitu pertama tidak adanya aktivitas Investasi Semua penerimaan dan pengeluaran. Dimana terdapat fakta bahwa CPOPC tidak melakukan investasi dan lebih mengutamakan pendanaan. Kedua yaitu tidak adanya kebijakan akuntansi. Hal ini dikarenakan bahwa CPOPC tidak melakukan kebijakan akuntansi sendiri melainkan dibawah naungan Kebijakan Akuntansi Lembaga Perkebunan dan Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian Tugas Akhir diatas, Analisis Beban Operasional Pada Council of Palm Oil Countries dengan kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Dari 6 Prosedur PSAK No. 45, Council of Palm Oil Producing Countries telah menerapkan 5 SOP namun terdapat 1 yang belum diterapkan yaitu tidak terdapat nilai kepemilikan dalam sebuah organisasi yang focus pada laba/keuntungan. Alasannya tidak menerapkan SOP tersebut karena CPOPC sudah memiliki susunan organisasi.
2. Dari Pencatatan Pembiayaan PSAK No.45, Council of Palm Oil Producing Countries telah menerapkan hampir semuanya tetapi ada beberapa yang tidak bisa diterapkan antara lain yaitu:
 - a. Tidak adanya aktivitas Investasi Semua penerimaan dan pengeluaran. Alasannya karena CPOPC tidak melakukan investasi dan lebih mengutamakan pendanaan.
 - b. Tidak adanya kebijakan akuntansi. Alasannya karena CPOPC tidak melakukan kebijakan akuntansi sendiri melainkan dibawah naungan Lembaga Perkebunan dan Negara.

Saran yang dapat disampaikan kepada pembaca tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diharapkan dapat melakukan semua Prosedur PSAK No. 45 agar dapat memaksimalkan tujuan perusahaan. Sehingga standard pelaporan dan pelaksanaan benar-benar telah sesuai dengan ketentuan akuntansi.
2. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diperlukan adanya kebijakan akuntansi sendiri dalam melakukan pencatatan pembiayaan dan menerapkan sesuai dengan PSAK No. 45. Sehingga dapat melaksanakan pelaporan sesuai dengan kaidah-kaidah standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, D. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 160-177.
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri. 2003. *Anggaran Perusahaan*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFU UGM
- Ahmadi, Firdaus Dunia dan Wasilah Abdullah. 2012. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basuki, Sulistyono. 1996. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budi, S. (2019). Analisis pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang terhadap tingkat laba serta dampaknya terhadap harga saham (Studi Terhadap Perusahaan Otomotif pada Malaysia Exchange Stock Tahun 2011-2016). *Keberlanjutan*, 4(2), 1098. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1098-1117>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2011). PSAK No. 45 (revisi 2011): *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: IAI
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2014. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2014 - 2016*. Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- George R. Terry. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Hornigren, Charles T., Walter T. Harrison Jr., (2007), *Akuntansi*. Edisi 7. (Diterjemahkan oleh: Gina Gandia dan Danti Pujiati). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik* 31 Maret 2011. Salemba Empat. Jakarta.
- J. Salusu, 2004, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Grasindo.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group).
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, edisi 5*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu manajeme YKPN.
- Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Salusu, J. 2014. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Dikutip 01 Februari 2018, dari <http://opac.web.id/>
- Siregar, Baldric, Bambang Suropto, Dodi Hapsori. Dkk. 2014. *Akuntansi Biaya*, Smith dan Skousen. 1995. *Akuntansi Intermediate*. Terjemahan Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sunardi. Primastiwi, A. 2015. *Pengantar Bisnis: Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Supriyono, R. 2011. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan pengendalian biaya, serta pengembalian keputusan*. Yogyakarta :BPFE
- Supriyono. 2011. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, Buku 1 Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Warren dkk. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.